

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan Negara agar dapat berjalan dengan baik (Suandy, 2016). Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang dihasilkan. Beban pajak tersebut dapat dikurangi dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (Suandy, 2016).

Pada kegiatan *tax avoidance*, Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin mengoptimalkan penerimaan pajak Negara. Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk meminimalisasikan kewajiban pajak yang dianggapnya legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung. Permasalahan *tax avoidance*

merupakan permasalahan yang unik dan rumit karena di satu sisi kegiatan *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan undang-undang, sedangkan di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly (penyidik dari IMF tahun 2016) berdasarkan survey yang dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar AS yang pajak perusahaannya tidak dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (www.tribunnews.com). Hal tersebut menunjukkan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan dari tahun 2013 hingga 2017 yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK
TAHUN 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1450,9
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.399,8
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	91%

Sumber: Menu Informasi Publik Laporan Kinerja Portal DJP, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak tahun 2013 hingga 2017. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.399,8 triliun atau 91 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

(APBNP) 2017. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan realisasi penerimaan tahun 2017 masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 81,6 persen dari target APBNP 2016 dan dari sisi nominal penerimaan perpajakan sepanjang 2017 juga tumbuh 4,3 persen dibanding dengan tahun sebelumnya (www.cnnindonesia.com). Jika dilihat pada tabel, pencapaian pajak dari tahun 2013 mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut yaitu sampai tahun 2016. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak pada tahun-tahun tersebut adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Bawono Kristiaji sebagai Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) menilai bahwa penyebab terjadinya tren *shortfall* tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak atau rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak yang tercermin dari data penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya (www.liputan6.com).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2016 menurut DJP terdapat 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastadi, perusahaan tersebut tidak membayar pajak karena alasan merugi terus-menerus tetapi perusahaannya masih eksis meskipun mengalami kerugian. Sebanyak 2.000 perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak selama sepuluh tahun. Aktivitas penghindaran pajak ini dilakukan dengan berbagai modus (www.liputan6.com).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, ada tiga penyebab utama perusahaan asing tersebut melakukan penghindaran pajak dengan alasan merugi terus-menerus. Pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, perusahaan asing tersebut merugi karena banyak perusahaan yang memperoleh fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat pengajuan pengaduan, perusahaan tersebut sering meninggikan biaya pembelian barang modalnya sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian terus-menerus. Ketiga, perusahaan tersebut sering berganti nama dengan tujuan untuk memperoleh kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi (www.liputan6.com).

Kasus penghindaran pajak terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi perusahaan di Singapura yaitu PT Rajawali Nusantara. Pada tahun 2016, PT RNI menjalani proses pemeriksaan oleh DJP, karena diduga melakukan penghindaran pajak dengan banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kegiatan pajaknya. PT RNI tersebut terdaftar sebagai perseroan terbatas di Indonesia, tetapi perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Pemilik perusahaan tersebut yang berada di Singapura tidak menanamkan modal pada PT RNI di Indonesia, tetapi mereka memberikan seolah-olah seperti hutang. Apabila bunga yang timbul

dari hutang itu dibayarkan, maka akan dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura karena modalnya yang dianggap hutang tersebut. Modal yang dianggap hutang tersebut, akan mengurangi pajak yang akan dibayar oleh PT RNI karena hutang dianggap sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Modus lainnya yang dilakukan PT RNI yaitu dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final satu persen (www.ekonomi.kompas.com).

Pada dasarnya *tax avoidance* bukanlah tindakan yang melanggar hukum karena menurut Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan untuk mengatur sendiri (*self assessment system*) bagaimana mereka bertransaksi untuk memperkecil beban pajaknya sepanjang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Pengertian *tax avoidance* sendiri merupakan upaya penghindaran pajak secara legal (Suandy, 2016). Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*.

Intensitas modal didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap dan persediaan. Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Hubungan intensitas modal yang diproksikan dengan adanya kepemilikan aset tetap terhadap *tax avoidance* yaitu adanya aset tetap di suatu perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak yang akan dibayar perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi atau biaya penyusutan yang bersifat

deductible expense. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dimanfaatkan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi kecil. Penelitian yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) serta Dharma dan Ardiana (2016) mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Wiguna dan Jati (2017) serta Putra dan Merkusiwati (2016) mengungkapkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan (Fakhrudin, 2008). Penambahan jumlah hutang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang yang dimaksud yaitu hutang jangka panjang, sehingga beban bunga tersebut akan mengurangi beban pajak. Bunga atas pinjaman tersebut merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang dapat digunakan dalam memperkecil pajak perusahaan, sehingga berpeluang bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Annisa (2017) serta Swingly dan Sukartha (2015) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Faizah dan Adhivinna (2017) serta Putra dan Merkusiwati (2016) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Total aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan berapa ukuran perusahaannya sehingga semakin besar total aset perusahaan tersebut maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Menurut

Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diunjukkan atau dinilai melalui total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain pada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan aset yang dimiliki perusahaan juga semakin besar. Dalam aset terdapat jenis aset tetap yang mengalami penyusutan kecuali tanah yang dapat dibiayakan dalam perpajakan serta dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Alviyani (2016) serta Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Annisa (2017) serta Faizah dan Adhivinna (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi kegiatan *tax avoidance*. *Sales growth* menunjukkan adanya peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan mempunyai pengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan, karena semakin meningkatnya *sales growth* akan membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk memperkecil pajak yang menjadi tanggungannya. Penelitian dari Oktamawati (2017) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang

dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penjelasan fenomena di atas merupakan bukti bahwa aktivitas *tax avoidance* selama beberapa tahun ini menjadi isu global untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun luar Negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga berita yang disebutkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia masuk peringkat 11 terbesar yang pajak perusahaannya tidak dibayarkan ke DJP sehingga hal tersebut akan sangat merugikan negara. Selain itu, karena adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance*, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4 Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang pengaruh intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan *tax avoidance* secara legal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan keputusan berinvestasi di suatu perusahaan dengan memberikan pandangan mengenai tindakan perusahaan dalam memperlakukan kewajiban perpajakannya.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal pada penelitian ini secara menyeluruh disusun dalam tiga bab serta diuraikan dalam beberapa subbab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini, adanya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang akan memunculkan landasan teori dan menjadi kerangka pemikiran peneliti serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan prosedur peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan cara rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, uji validitas dan uji reabilitas, data dan pengumpulan data, serta teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan gambaran dari subyek penelitian yaitu perusahaan manufaktur, hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai model regresi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang berkaitan dengan analisa hasil regresi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.